

AGRAPANA

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. 1, No. 2, Juli, 2024

Tersedia online di: <https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/agrapana>

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM Lontong Lepet (Studi di Desa Ngumpul Kabupaten Jombang)

Zaenal Arifin¹, Hudallah², Nieke Rudyanty Winanda³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Darul 'Ulum

*korespondensi: zaenalarifinjom@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini menjadikan pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan UMKM, salah satunya adalah UMKM lontong lepet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lontong lepet di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan model interaktif yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ngumpul mempunyai peran yang signifikan dalam mendukung pengembangan UMKM lontong lepet. Pemerintah Desa Ngumpul telah membuat regulasi mengenai pengembangan UMKM Desa sekaligus memberikan sejumlah fasilitas berupa pelatihan dan pembinaan, tempat produksi, bantuan peralatan produksi, pembiayaan atau permodalan, serta promosi maupun pemasaran.

Kata kunci: peran; pemerintah desa; pengembangan; umkm lontong lepet

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a sector that can absorb a lot of labor and improve the community's economy. This makes the government pay serious attention to the development of MSMEs, one of which is the lontong lepet MSME. The aim of this research is to analyze the role of village government in the development of lontong lepet Micro, Small, and Medium Enterprises in Ngumpul Village, Jombang Regency. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. Then the data is analyzed using an interactive model, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the Ngumpul Village Government has a significant role in supporting the development of lontong lepet MSMEs. The Ngumpul Village Government has made regulations regarding the development of Village MSMEs as well as providing a number of facilities in the form of training and coaching, production sites, assistance with production equipment, financing or capital, as well as promotion and marketing.

Keywords: role; village government; development; lontong lepet MSMEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar warga sebagai tumpuan dalam memperoleh penghasilan atau pendapatan. Pengenalan UMKM menjadi strategis karena mempunyai potensi yang hebat dalam mengubah perekonomian sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi warga (Ariani & Utomo, 2017). Hal ini sejalan dengan tujuan perberdayaan UMKM sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan tersebut menyebutkan pemberdayaan UMKM bisa meningkatkan pembangunan suatu daerah, menciptakan beragam lapangan kerja, pendapatan pertumbuhan ekonomi dapat merata, serta mengentaskan permasalahan kemiskinan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023) menjelaskan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto yakni mencapai Rp 9.580 triliun atau sebesar 61% sekaligus penyerapan tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja.

UMKM memiliki peranan yang krusial dalam pembangunan ekonomi di daerah-daerah. Sektor ini juga dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Supriyono (2006) menjelaskan UMKM memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan usaha besar yakni kemampuan dalam menyerap tenaga kerja maupun menggunakan sumber daya lokal, serta usahanya relatif fleksibel. Hal tersebut menunjukkan UMKM dapat bermakna bagi pertumbuhan di perkotaan maupun pedesaan (Hamid & Iqbal, 2017). Pertumbuhan ekonomi di tingkat desa adalah elemen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat

lokal. Guntari et al. (2024) mengemukakan bahwa di tengah kompleksitas tantangan global maupun dinamika pasar, strategi pemerintah desa dalam penyelenggaraan sektor UMKM menjadi fokus kajian yang strategis.

Desa Ngumpul merupakan salah satu desa di Kabupaten Jombang yang mempunyai beragam jenis UMKM. Salah satu produk unggulan yang menjadi ikon Desa Ngumpul yaitu UMKM lontong lepet. Di mana terdapat 125 unit UMKM yang berfokus pada produksi lontong lepet. Banyaknya UMKM tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa setempat. Pemerintah desa mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan UMKM di mana mereka dapat memberikan dukungan fisik, emosional, serta finansial. Di desa ini juga terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menaungi para pelaku UMKM lontong lepet. KUB ini menjadi wadah bagi para pengusaha lontong lepet untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman, serta menyampaikan aspirasi ke pemerintah desa.

Tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM lontong lepet di Desa Ngumpul adalah keterbatasan modal usaha sekaligus akses pasar dalam kegiatan promosi ataupun pemasaran. Dengan potensi yang ada saat ini serta dukungan dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah desa, UMKM lontong lepet di Desa Ngumpul memiliki prospek yang menjanjikan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian desa.

Rusda et al. (2023) menjelaskan bahwa peran pemerintah desa dapat memberikan dampak yang positif terhadap pengembangan UMKM, yakni: (1) peningkatan keterampilan sekaligus pengetahuan para pelaku UMKM; (2) peningkatan kapasitas produksi; (3) peningkatan pendapatan;

serta (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, Tohir et al. (2023) menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat menjalankan peran sebagai stabilisator, inovator, modernisator, serta pelopor dalam rangka mendorong pelaku UMKM agar bisa mengembangkan bisnis mereka. UMKM akan maju pesat dengan berbagai dukungan atau bantuan, serta arahan dari pemerintah desa, tetapi pemerintah seharusnya tidak mengontrol pertumbuhan UMKM agar kemampuan pasar dapat berkembang sendiri (Wiranti et al., 2024). Pengembangan UMKM di wilayah pedesaan akan selalu berkaitan dengan peran pemerintah desa setempat, meskipun upaya yang dilakukan oleh mereka ada yang berjalan lancar maupun tidak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lontong lepet di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM lontong lepet di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya lebih menekankan pada makna sekaligus nilai karena tujuannya adalah untuk menjelaskan secara detail mengenai peristiwa yang dikaji. Sugiyono (2019) menyebutkan penelitian kualitatif berdasarkan filsafat postpositivisme serta dimaksudkan untuk meneliti pada kondisi entitas alamiah. Sehingga peneliti harus menemukan jawaban atas pertanyaan yang menitikberatkan pada bagaimana

pengalaman sosial itu bisa diciptakan maupun diberi makna.

Penelitian dilakukan di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang berdasarkan pertimbangan bahwa desa ini mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan UMKM lontong lepet. Hal ini terlihat dari banyaknya UMKM lontong lepet yang ada di Desa Ngumpul, yakni mencapai 125 unit. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti, di mana ia mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Ahmadi (2014) menjelaskan bahwa peneliti memiliki tanggung jawab dalam menghimpun data yang relevan di mana relevansi data tersebut dapat berubah ketika penelitian itu berproses- serta menemukan makna dari data dalam bentuk kata-kata maupun tindakan banyak orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan guna menggali informasi dari informan yang turut terlibat dalam pengembangan UMKM lontong lepet di Desa Ngumpul Kabupaten Jombang, khususnya pemerintah desa. Observasi dilakukan untuk mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat dalam pengembangan UMKM lontong lepet. Sedangkan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan beragam data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian, sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer yakni: hasil wawancara sekaligus observasi, serta dokumen-dokumen tertulis, dan data sekunder didapatkan dari buku, artikel jurnal, maupun sumber lain yang relevan.

Penelitian ini menggunakan model interaktif dalam melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data merupakan proses kelanjutan dari beragam data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Data

yang diperoleh harus diolah dan dianalisis agar lebih mudah dipahami. Miles & Huberman dalam Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara konsisten hingga data itu sudah mencapai titik jenuh. Kegiatan tersebut pada hakikatnya dilakukan secara bersamaan, mulai dari reduksi data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Ngumpul

Desa Ngumpul adalah salah satu desa di Kabupaten Jombang dengan jumlah penduduk sekitar 8.242 orang dan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Salah satu potensi ekonomi tersebut adalah sektor UMKM. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2023), jumlah UMKM di Desa Ngumpul hingga saat ini adalah sebanyak 250 unit. UMKM tersebut bergerak di berbagai bidang, seperti kuliner, kerajinan, dan jasa. Namun, sebagian besar UMKM di Desa Ngumpul adalah produksi lontong lepet yaitu mencapai 125 unit. Di mana UMKM lontong lepet merupakan potensi ekonomi unggulan Desa Ngumpul sehingga sektor ini dijadikan salah satu fokus utama pembangunan desa.

Kondisi dari setiap UMKM lontong lepet yang ada di Desa Ngumpul sangat bervariasi, mulai dari skala usaha, omset bulanan, lama usaha yang dijalankan, kapasitas produksi, hingga jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Sektor UMKM lontong lepet didominasi oleh usaha mikro dan kecil dengan omset bulanan yang beragam yakni mulai kurang dari 2 juta hingga lebih dari 15 juta. Lama usaha produksi lontong lepet juga bervariasi, yakni kurang dari 1 tahun hingga lebih dari 10 tahun. Selain itu, kapasitas produksi dari masing-masing pelaku usaha juga beragam di mana dari mereka

mampu memproduksi mulai kurang dari 100 porsi per hari hingga ribuan porsi dengan jumlah tenaga kerja sekitar 1 sampai lebih dari 5 orang. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kondisi UMKM Lontong Lepet di

Desa Ngumpul		
Kategori	Sub-Kategori	Jumlah
Skala Usaha	Mikro	95
	Kecil	30
Omset Bulanan	<Rp 2 juta	30
	Rp 2 juta - Rp 5 juta	48
	Rp 5 juta - Rp 10 juta	32
	Rp 10 juta - Rp 15 juta	12
	>Rp 15 juta	3
Lama Usaha	<1 tahun	15
	1-3 tahun	20
	3-5 tahun	45
	6 - 10 tahun	35
	> 10 tahun	10
Kapasitas Produksi	< 100 porsi/hari	25
	100 - 500 porsi/hari	45
	500 - 1000 porsi/hari	40
	> 1000 porsi/hari	15
Tenaga Kerja	1 orang	40
	2 - 3 orang	55
	4 - 5 orang	20
	> 5 orang	10

Sumber: Data Primer (2024)

Banyaknya pelaku UMKM lontong lepet di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang menunjukkan besarnya dukungan yang diberikan kepada mereka, baik berupa material maupun non material. UMKM yang ada di sebuah desa

pada hakikatnya tidak terlepas dari peran pemerintah desa setempat.

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM Lontong Lepet

Pemerintah Desa Ngumpul dalam pengembangan UMKM lontong lepet memainkan peranan yang sentral. Pertama, pemerintah desa setempat Pemerintah Desa Ngumpul telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan UMKM lontong lepet melalui pembuatan regulasi atau kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan UMKM Desa. Selain itu, pemerintah desa setempat mengalokasikan dana desa untuk beragam kegiatan dalam rangka pengembangan UMKM, terutama lontong lepet. Di mana Desa Ngumpul dikenal sebagai penghasil lontong lepet terbanyak di Kabupaten Jombang. Adanya regulasi atau kebijakan dan alokasi dana desa ini menunjukkan menunjukkan keseriusan pemerintah desa setempat dalam mendukung pengembangan UMKM lontong lepet.

Kedua, Pemerintah Desa Ngumpul memberikan fasilitas berupa pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM lontong lepet (Gambar 1). Pelatihan dan pembinaan oleh pemerintah desa mencakup aspek-aspek penting dalam pengembangan UMKM lontong lepet, seperti: manajemen usaha, pengemasan produk, dan pemasaran digital. Frekuensi pelatihan yang diberikan pemerintah desa setempat, yakni: manajemen usaha dilakukan 2 (dua) kali setahun; pengemasan produk 1 (satu) kali setahun; serta pemasaran digital sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ngumpul telah melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM secara berkala. Namun, salah satu pelaku

usaha UMKM lontong lepet pemula menyebutkan bahwa masih ada kebutuhan akan pelatihan yang lebih spesifik, terutama terkait permodalan dan strategi pemasaran. Artinya, pemerintah desa perlu mempertimbangkan untuk menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan dari setiap pelaku UMKM lontong lepet. Guntari et al. (2024) menjelaskan bahwa pemberian pelatihan dan pembinaan yang ditujukan kepada pelaku UMKM ini penting karena membantu mereka untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola usaha sekaligus menghadapi persaingan pasar yang semakin kompleks.



Gambar 1.
Pelatihan Produksi Lontong Lepet

Ketiga, pemerintah desa setempat menyediakan sarana dan prasarana berupa pembangunan sentra kuliner lontong, penyediaan 10 gerobak bagi UMKM pemula, serta bantuan peralatan produksi usaha. Upaya tersebut merupakan langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Desa Ngumpul dalam mendorong kemajuan usaha lontong lepet. Di lain sisi, salah satu pelaku usaha UMKM lontong lepet di desa ini menyebutkan bahwa masih ada kebutuhan akan modernisasi peralatan produksi sehingga perlu adanya

dukungan infrastruktur fisik secara berkelanjutan dari pemerintah desa setempat.



Gambar 2.
Pemberian Bantuan Alat Produksi
Lontong Lepet

Keempat, Pemerintah Desa Ngumpul memfasilitasi akses permodalan atau pembiayaan melalui kerja sama dengan BUMDes untuk penyaluran pinjaman modal. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tidak semua UMKM lontong lepet yang dijalankan oleh warga setempat berjalan mulus. Di mana akses permodalan masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM, terutama yang baru memulai usaha. Kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa dengan BUMDes menunjukkan adanya sinergi kedua belah pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Selain itu, pemerintah desa juga menjalin hubungan kerja sama dengan sebuah komunitas yang menaungi sektor produksi lontong lepet atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) guna mengetahui kebutuhan maupun tantangan yang dihadapi oleh mereka. Ketua KUB menyebutkan beberapa tantangan yang mereka hadapi, yaitu: fluktuasi harga bahan baku, persaingan produk serupa dengan desa lainnya, dan keterbatasan dalam

pemasaran secara online. Tohir et al. (2023) menjelaskan bahwa pemerintah desa bisa berperan sebagai stabilisator yakni dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan ataupun program yang dapat dalam mengembangkan bisnis UMKM, salah satunya adalah bantuan dalam bentuk akses ke pasar dan modal.

Terakhir, Pemerintah Desa Ngumpul turut melakukan promosi dan pemasaran lontong lepet. Pasalnya lontong lepet yang diproduksi oleh warga setempat telah dipasarkan di outlet BUMDes sekaligus sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Jombang maupun luar Kabupaten Jombang. Sehingga pemasaran lontong lepet buatan warga Desa Ngumpul tidak hanya dilakukan di Kabupaten Jombang saja, melainkan juga merambah hingga luar daerah seperti Mojokerto, Krian, Sidoarjo, Surabaya, dan sekitarnya. Pemerintah Desa Ngumpul juga membantu pelaku usaha lontong lepet dalam melakukan promosi yakni dengan berpartisipasi pada acara penyelenggaraan festival atau karnaval yang rutin diadakan setiap bulan Agustus, Tahlil Kubro, Haul, dan sejumlah acara besar lainnya yang diselenggarakan oleh desa setempat. Dari sini dapat diketahui minimnya pemanfaatan teknologi oleh para pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan pemasaran.

Dalam hal promosi dan pemasaran, pemerintah desa setempat dapat bekerja sama dengan lembaga pemasaran produk, baik lembaga pemerintah, agen penjualan, maupun pihak terkait lainnya agar produk UMKM lontong lepet lebih dikenal oleh masyarakat luas, contohnya melalui pemanfaatan *e-commerce*. Gustari et al. (2024) menjelaskan bahwa kerja sama yang terjalin antara berbagai pihak dapat membantu meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan memperbaiki manajemen maupun kualitas produk yang dihasilkan.

Keterlibatan pemerintah desa setempat dan pelaku UMKM lontong lepet ini telah membawa dampak yang positif, antara lain: (1) peningkatan omset penjualan rata-rata sebesar 30% dalam 2 (dua) tahun terakhir; (2) penciptaan 45 lapangan kerja baru; (3) peningkatan kontribusi sektor UMKM terhadap PADes sebesar 25%; serta (4) meningkatnya branding Desa Ngumpul sebagai sentra lontong lepet.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Ngumpul telah menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung pengembangan UMKM lontong lepet. Peranan tersebut mencakup beberapa aspek penting, yaitu: pembuatan regulasi atau kebijakan mengenai pengembangan UMKM, penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan atau permodalan, serta promosi dan pemasaran. Dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah desa setempat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM lontong lepet secara umum telah berjalan cukup baik, walaupun terdapat aspek-aspek yang perlu untuk ditingkatkan seperti: penyesuaian kebutuhan oleh pelaku UMKM, standar produksi, serta pemanfaatan teknologi dalam kegiatan promosi maupun pemasaran.

SARAN

Pemerintah desa setempat dan pelaku usaha lontong lepet perlu menjalin kerja sama dengan pihak luar, seperti pemerintah daerah, swasta dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan, pemberian modal, serta perluasan upaya promosi maupun pemasaran untuk pengembangan UMKM lontong lepet di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ariani, & Utomo, M. N. (2017). Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 13(2), 99- 118.
- Guntari, Y., Yuliani, D., & Garvera, R. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 102-113. doi: <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.489>.
- Hamid, R. S., & Iqbal, M. (2017). Analisis Dampak Kepercayaan pada Program Remaja Penggunaan Media Pemasaran Online (E-Commerce) yang Diadopsi oleh UMKM. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 16(3), 310-337.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>
- Rusda, A., Jaya, A.H., & Adda, H.W. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM di Desa Sibalaya Selatan. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1(2), 18–25. doi: <https://doi.org/10.59581/jrim>.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian*

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, S. (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 3(1), 1-16.

Tohir, R., Purnamasari, H., & Aditya, I. (2023). Peran Pemerintah Desa: Pengembangan UMKM di Desa Wisata Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. *Jurnal Trias Politika*, 7(2), 293-310.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.